

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
(Studi di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

Ida Swasanti

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro

Email : ida.swasanti@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program for low-income people (MBR) in Gununganyar Village, Soko District, Tuban Regency. The research uses the evaluation theory of William N. Dunn, which consists of six main indicators. Namely, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Research with descriptive method through a qualitative approach. Purposive Sampling method was used in determining the informants.

The results of the study, the effectiveness criteria have been running effectively, although in determining the recipients it is not optimal because socialization is still lacking. The efficiency criteria have also been fulfilled because all the efforts carried out have been running well, but have not been able to reach the adequacy criteria because self-reliance from KPB was not created. So, the receiving community has to spend more money for the wages of the artisans.

Researchers suggest that the role and function of all implementing officials be increased and give strict sanctions in case of irregularities. The provision of socialization should be carried out evenly to all levels of society, it is necessary to provide guidance to residents in the hope of optimal self-reliance.

Keywords: Evaluation, Self-help Housing Stimulant Assistance, Program

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Riset menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn, yang terdiri dari enam indikator utama. Yakni, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode Purposive Sampling digunakan dalam menentukan informan.

Hasil penelitian, pada kriteria efektivitas sudah berjalan secara efektif, meskipun dalam penetapan penerima belum optimal karena sosialisasi yang masih kurang. Kriteria efisiensi juga sudah tercukupi karena seluruh usaha yang dilakukan berjalan dengan baik, namun belum bisa mencapai kriteria kecukupan karena swadaya dari KPB tidak tercipta. Sehingga, masyarakat penerima harus mengeluarkan dana lebih untuk upah tukang.

Peneliti menyarankan agar peran serta fungsi seluruh aparat pelaksana ditingkatkan serta pemberian sanksi tegas apabila terjadi penyelewengan. Pemberian sosialisasi seharusnya dilakukan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan pembinaan kepada warga dengan harapan terciptanya swadaya secara optimal.

Kata Kunci : Evaluasi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Program

PENDAHULUAN

Di Indonesia, jumlah masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata masih cukup besar. Sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mendapatkan rumah yang layak huni serta terjangkau sesuai kondisi perekonomian mereka. Inilah yang menjadi penyebab masih banyak warga memiliki tempat tinggal yang termasuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih mereka tempati hingga saat ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Permen PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam rangka usaha pengurangan angka kemiskinan yang ada di Indonesia membentuk serta melaksanakan suatu program bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah pada bidang infrastruktur yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pada 2019, pemerintah menargetkan program BSPS mampu menjangkau sejumlah 206.500 unit rumah tidak layak huni yang dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kualitas rumah dengan total 198.500 unit serta untuk pembangunan baru dengan total 8.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas program BSPS Kementerian PUPR telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR No. 158 Tahun 2019 tentang Penaikan Besaran Nilai BSPS untuk dua kategori yaitu Penaikan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) yang merupakan jenis-jenis bantuan.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mendapatkan kuota penyaluran program BSPS sebanyak 250 unit rumah pada tahun 2019. Kuota ini disalurkan pada lima pemerintah desa di berbagai kecamatan yaitu Desa Gununganyar Kecamatan Soko; Desa Grabagan Kecamatan Grabagan; Desa Kanorejo Kecamatan Rengel; serta Desa Sumurgung dan Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban.

Desa Gununganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang mendapatkan BSPS pada 2019. Program bantuan di Desa Gununganyar dilaksanakan sesuai Permen PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang BSPS. Oleh sebab itu, program BSPS di Desa Gununganyar masuk jenis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dengan bantuan dana Rp 17,5 juta dengan jumlah swadaya dari penerima yang berbeda-beda dari Rp 5 juta hingga Rp 30 juta. Penerima BSPS dipilih berdasarkan hasil validasi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) program BSPS.

Meski sudah berjalan, permasalahan masih muncul di lapangan. Di antaranya adalah ketidaksesuaian kualifikasi pada beberapa penerima BSPS seperti yang diutarakan Sumarno, warga setempat. Dikatakan warga, penerima BSPS di Desa Gununganyar rata-rata merupakan warga yang berkecukupan dalam hal ekonomi dan bila dilihat dalam hal bangunan rumahpun dinilai masih bagus. Di lain pihak masih banyak warga yang sangat membutuhkan, namun tidak mendapatkan program bantuan tersebut.

Peneliti juga menemukan dana BSPS Rp. 17.500.000,- yang diambil melalui rekening Bank BRI selama dua tahap dengan dibantu oleh TFL, tidak diberikan berupa uang langsung kepada yang bersangkutan, melainkan berupa

bahan-bahan bangunan. Seperti yang dikemukakan Narti, warga yang menerima bantuan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program BSPS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

Secara teoritik, evaluasi merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengukur atau menilai dari jalannya suatu program dengan tujuan mengidentifikasi apakah program tersebut sudah berjalan sesuai rencana daan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat hasil akhir program yang telah di laksanakan kemudian dibandingkan dengan hasil yangseharusnya dicapai sebagai tujuan awal dari program. Dalam jalannya suatu program, evaluasi digunakan sebagai proses penilaian dan pengkajian ulang yang berguna untuk menilai serta memperbaiki program agar sesuai dengan rencana awal.

Menurut Uzer (2003), evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Pada setiap program yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula dengan evaluasi. Arikunto (2009) menyatakan bahwa tujuan evaluasi ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk

tujuan umum berfokus terhadap keseluruhan program, dan tujuan khusus berfokus terhadap masing-masing komponen yang ada.

Fokus dari evaluasi adalah nilai dari suatu kebijakan maupun program yang telah dilaksanakan suatu pihak. Tujuan dari evaluasi adalah penentuan manfaat serta kegunaan dari suatu kebijakan maupun program dan tidak hanya dilakukan demi kepentingan pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang telah terlaksana. Dan lebih tepatnya tujuan serta sasaran merupakan hal yang diusahakan dalam penemuan jawaban dari evaluasi yang telah dilakukan.

Sedangkan evaluasi program dapat pula diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara sengaja tanpa mengabaikan adanya tujuan guna melihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu program. Ini sesuai yang ditulis oleh Arikunto (2004) yang menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan suatu rangkaian yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Sedangkan Tyler dalam Arikunto (2009) mengatakan, evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilaksanakan dengan tujuan guna memperoleh hasil atau manfaat terhadap pihak yang memang bersangkutan dengan program.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori evaluasi dari William N Dunn, dengan kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Secara garis besar, sesuai yang tercantum dalam PermenPUPR No. 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Upaya yang dilakukan oleh dinas PUPR ini adalah penyalurah BSPS disetiap daerah yang memenuhi persyaratan serta layak untuk mendapatkan kuota bantuan.

Dinas PRKP Kabupaten Tuban membentuk Tim pelaksana yang terdiri dari 1 Korfas serta 5 Tenaga Fasilitator yang bertugas disetiap desa. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan Tim Pelaksana guna memberikan pemahaman mengenai tujuan serta teknis pelaksanaan BSPS agar berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

Setelah dilakukan pengajuan calon penerima, maka TFL dimasing-masing akan melakukan kualifikasi bersama Dinas PUPR untuk menentukan calon penerima yang masuk kedalam persyaratan sesuai yang tercantum dalam peraturan.

Namun dalam proses kualifikasi penerima di Desa Gununganyar terkendala oleh calon penerima yang banyak mengundurkan diri karena terbebani oleh persyaratan yang diberikan oleh pemerintah. Yaitu setiap calon penerima harus memiliki kesiapan

swadaya karena mengingat bantuan ini hanya bersifat sebagai stimulan saja.

Dalam pelaksanaan program BSPS sebagai program yang di khususkan untuk masyarakat miskin, program BSPS di Desa Gununganyar sudah menunjukkan hasil yang efektif terbukti dengan rumah warga yang semula termasuk kedalam jenis rumah tidak layak menjadi layak huni. Meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak rumah warga miskin yang belum tersentuh bantuan hal ini dikarenakan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah secara tidak langsung membebani penerima bantuan karena mereka harus menyediakan uang lebih atau tabungan. Selain itu juga masih banyaknya masyarakat miskin di Desa Gununganyar yang belum menerima bantuan karena keterbatasan kuota yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan peran pemerintah agar tercapainya tujuan program sesuai yang tercantum dalam peraturan.

2. Efisiensi

Perlu diketahui bahwa sumber dana dari BSPS berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sesuai jenis bantuan yang mereka terima. Seluruh masyarakat penerima di Desa Gununganyar mendapatkan bantuan dengan jenis Penigkatan Kualitas saja, sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan stimulus Rp 17,5 juta. Masing-masing penerima di Desa Gununganyar memberikan swadaya dari tabungan yang mereka miliki baik itu berupa uang, hewan, maupun barang. Jumlah swadaya mereka pun bermacam yaitu dari 5 juta hingga 30 juta.

Para penerima bantuan juga telah merasakan dampak dari bantuan ini sesuai tujuan dibentuknya program BSPS. Bantuan ini sangat membantu mereka, namun untuk masyarakat

berpenghasilan rendah yang masih memiliki rumah tidak layak huni tapi bukan penerima harus bersabar karena belum bisa mendapatkan bantuan yang diakibatkan persyaratan yang dianggap memberatkan mereka dan uota yang terbatas.

Selain sumber dana yang jelas, juga sumber daya manusia sebagai tim pelaksana telah terkoordinasi dengan dibentuknya tim panitia pelaksana yang di bentuk langsung oleh Dinas PUPR yaitu terdiri dari Korfes dan TFL. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana dibentuk untuk mendukung berjalannya program BSPS sebagai tim panitia yang mengkoordinir, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi berjalannya program agar sesuai dengan tujuan dan dapat tepat sasaran. kriteria keberhasilan program BSPS ini juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh para pelaksana program.

Strategi yang diterapkan salah satunya adalah melalui sosialisasi tentang program BSPS kepada masyarakat miskin. Strategi lainnya adalah menjalin koordinasi dengan baik antara pelaksana program BSPS. Strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan program dengan baik.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan menguatkan antara hubungan alternatif kebijakan dan hasil yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Kriteria kecukupan pada program BSPS tidak hanya pada bagaimana pencapaian sasaran dengan biaya tertentu, melainkan juga dilihat dari bagaimana strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan program dengan baik.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat penerima maupun bukan penerima. Namun kenyataan

dilapangan sosialisasi yang dilakukan masih belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara merata. Akibatnya masyarakat belum memahami tujuan program serta jenis bantuan yang mereka terima.

Karena masyarakat tidak mengetahui jenis bantuan yang mereka Terima mengakibatkan mereka memiliki harapan lebih terhadap jumlah bantuan yang mereka terima. Dengan bantuan tersebut mereka menginginkan pembangunan rumah baru yang jauh lebih baik, tentu ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu bantuan yang mereka terima hanya sebatas Peningkatan Kualitas saja. Keterbatasan dana bantuan ini membuat masyarakat penerima bantuan harus mengeluarkan uang lebih untuk bisa menyelesaikan pembangunan rumah.

Ketercapaian indikator kecukupan dalam memecahkan masalah selain dipengaruhi keterbatasan dana juga dipengaruhi oleh hubungan kerjasama antara saudara dan para tetangga penerima bantuan. Namun kenyataannya swadaya dari dari Kelompok Penerima Bantuan sangat rendah atau tidak tercipta. Sehingga warga harus mengeluarkan dana lebih untuk biaya tukang karena berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi BSPS menyebutkan bahwa total bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan dengan jenis PKRS adalah sebesar Rp 17.500.000 dengan rincian Rp 15.000.000 untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2.500.000 untuk biaya tukang. Hal inilah yang menyebabkan program BSPS di Desa Gunung anyar belum mencapai kriteria kecukupan saat pelaksanaan evaluasi.

4. Pemeratan

Indikator pemerataan merupakan keadilan yang sama diberikan pada sasaran kebijakan. Sasaran dari program BSPS adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Pemerataan disini merujuk pada hubungan akibat dan usaha kelompok masyarakat.

Pada indikator pemerataan dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Gunung anyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban terdapat permasalahan yang muncul seperti saat proses belanja material yang tidak melibatkan penerima bantuan melainkan dilakukan oleh pihak TFL saja. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu seluruh bantuan harus diserahkan kepada penerima. Dengan begitu para penerima memiliki hak untuk belanja serta memilih bahan material sesuai yang mereka inginkan.

Selain itu masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni belum menerima bantuan karena terkendala syarat yang ditentukan oleh pemerintah serta keterbatasan kuota. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian program BSPS pada indikator pemerataan di Desa Gununganyar masih belum efektif. Sehingga perlunya dilakukan evaluasi oleh pemerintah agar program dapat berjalan sesuai tujuan.

5. Responsivitas

Penelitian yang dilakukan di lapangan diketahui bahwa kebanyakan masyarakat merespon dengan baik adanya program BSPS di Desa Gununganyar namun tidak jarang ada masyarakat yang menolak karena masalah keterbatasan dana yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan.

Sejauh ini respon masyarakat bukan penerima bantuan masih pasif, karena swadaya dari mereka yang tidak tercipta. Namun sikap mereka dapat

dimaklumi karena sebagian besar masyarakat Desa Gunung anyar bermatapencapaian sebagai seorang petani yang mengakibatkan mereka tidak cukup memiliki waktu luang untuk menyumbangkan tenaga mereka. Begitu pula dengan swadaya dari Kelompok Penerima Bantuan yang tidak tercipta dengan baik sehingga mengakibatkan seluruh pembangunan harus dilaksanakan oleh tukang tanpa adanya gotongroyong yang seharusnya didapat dari terbentuknya KPB.

Diharapkan agar program ini dapat berjalan terus namun diharapkan ada penambahan jumlah dana agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri yang tentu membebani masyarakat penerima. Meskipun adanya keterbatasan dana namun masyarakat sangat antusias dan terlihat dari semangat masyarakat penerima dalam memperbaiki rumah sehingga menunjukkan respon baik terhadap program ini.

6. Ketepatan

Indikator evaluasi mengenai ketepatan merujuk pada apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai untuk kelompok sasaran. Kriteria penerima Bantuan BSPS Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018. Selain melihat dari kondisi rumah juga dilihat dari mata pencaharian penerima bantuan apakah termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki pendapatan dibawah Rp 2.000.000. Jika kondisi rumah tidak layak huni tetapi pendapatan mencukupi maka penerima bantuan diprioritaskan untuk warga yang benar-benar memiliki penghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni sesuai kriteria.

Sebagian besar penerima BSPS di Desa Gununganyar bermatapencapaian

sebagai petani dengan penghasilan Rp 1.200.000 per bulan. Kondisi rumah yang mereka huni juga termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni, namun jika diteliti lebih mendalam lagi sebenarnya mereka masih mampu membangun rumah secara pribadi. Hal ini dapat dilihat dari besaran swadaya yang dikeluarkan oleh masing-masing penerima yaitu dari 5 hingga 30 juta rupiah dan jumlah itu tentu sangat besar untuk ukuran Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Selain indikator evaluasi ketepatan sasaran, indikator ketepatan dalam proses pembangunan rumah pada program BPS di Desa Gununganyar merupakan tolak ukur untuk mencapai tingkat efektivitas berjalannya program. Proses pelaksanaannya dipantau langsung oleh tim panitia dan Tenaga Fasilitator Lapangan desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini dijabarkan menggunakan model evaluasi menurut William N Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Dilihat dari indikator efektivitas, pelaksanaan program BPS ini sudah efektif meskipun tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan juga terdapat keluhan dari kelompok sasaran terkait dana bantuan. Selain itu juga selama program ini berjalan tetapi belum dapat berjalan maksimal untuk mengurangi angka kemiskinan karena masih banyaknya masyarakat miskin di Desa Gununganyar yang belum menerima bantuan karena keterbatasan kuota serta persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Pada indikator efisiensi, sumber dana program BPS ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Republik Indonesia. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana dan dibentuk tim panitia untuk mengkoordinir, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi program BPS agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Terkait dengan dana bantuan yang diberikan sudah cukup baik yaitu berupa uang namun diperlukan swadaya dari masyarakat penerima baik dalam bentuk barang maupun uang untuk menyelesaikan pembangunan. Selain sumber dana yang jelas, sumber daya manusia (SDM) sebagai tim pelaksana telah terkoordinasi dengan dibentuknya tim panitia pembangunan.

Pada indikator kecukupan, program BPS dianggap masih belum maksimal karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Disini kelompok sasaran harus menyiapkan uang pribadi untuk tambahan biaya pembangunan. Dana yang terbatas dan swadaya dari masyarakat maupun KPB yang belum tercipta dengan baik menyebabkan pelaksanaan program BPS di Desa Gununganyar belum mencapai kriteria kecukupan.

Pada indikator pemerataan kelompok sasaran mendapatkan dana bantuan disesuaikan dengan jenis bantuan yang mereka terima yaitu Peningkatan Kualitas saja sehingga satu sama lain jumlahnya sama. Akan tetapi masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena terkendala syarat yang ada yaitu penerima program bantuan didahulukan yang memiliki tabungan.

Dilihat dari indikator responsivitas yang mengarah kepada kepuasan kebutuhan mendapat tanggapan yang cukup baik. Sejauh ini respon masyarakat Desa Gununganyar masih bersifat positif dan diharapkan agar program ini dapat terus berjalan dan ada tambahan dana bantuan. Meskipun

terdapat keterbatasan dana serta swadaya dari masyarakat sekitar maupun KPB yang tidak tercipta, masyarakat penerima sangat antusias terlihat dengan semangat mereka dalam memperbaiki rumah mereka agar menjadi hunian yang layak. Responsivitas dari panitia sendiri demi untuk mendukung ketercapaian tujuan sangat mendukung dan menampung segala keluhan, kritik dan saran dari kelompok sasaran.

Pada indikator ketepatan secara umum jika dilihat dari persyaratan penerima bantuan sudah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam PermenPUPR No 07 Tahun 2018 tentang BSPS. Namun apabila diteliti lebih mendalam lagi dapat ditemui adanya ketidaksesuaian sasaran penerima bantuan. Ketidaktepatan sasaran terjadi karena adanya penolakan oleh kelompok sasaran atas bantuan program BSPS ini dikarenakan tidak adanya kesiapan swadaya dari masyarakat untuk proses pembangunan rumah, akibatnya hanya masyarakat yang memiliki kesiapan swadaya dan sebenarnya mampu untuk membangun rumah secara pribadi yang akhirnya masuk dalam kriteria penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta. 2009.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2014.
- Idham, Noor Choliz. *Arsitektur dan Kenyamanan Termal*. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta. 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Depdikbud. 2014.
- Mulyadi, D. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta. 2016.
- Mulyatiningsih, Endang. *Evaluasi Proses Suatu Program*. Bumi Aksara. Jakarta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Uzer, Mohammad Usman. *Menjadi Guru Profesional*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2003.
- Wirawan. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Jakarta. 2015.
- Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 Tentang Besaran Nilai Dan Lokasi BSPS.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Tentang BSPS.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Amandemen IV)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Trisa Aminin, Muhamad Farid Ma'ruf. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Campurejo, Kecamatan. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. 2017.
- Zulkarnain. *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Parigi Selatan*. Universitas Tadulako. Parigi Moutong. 2016.